



## Parkir Nuthuk Dominasi Aduan Wisatawan Selama Lebaran

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima sejumlah aduan dari wisatawan via hotline yang disiagakan sepanjang libur lebaran silam. Namun, seakan tidak ada kapoknya, mayoritas aduan mengeluhkan soal fenomena parkir nuthuk di kawasan Malioboro.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko, menjelaskan, sejatinya tidak terlalu banyak informasi dan pelangaran serius, yang diterima kanalnya selama libur lalu. Hanya saja, aduan parkir nuthuk, atau menaikkan tarif di luar batas, harus diresponsnya.

"Terbanyak laporan masuk soal parkir nuthuk Rp30 ribu, keluhannya di sekitaran Malioboro. Makanya, itu langsung ditindaklanjuti teman-teman Dinas Perubungan, dengan mengirim personel," ujarnya, Selasa (10/5).

Sementara chat, atau telepon lainnya yang masuk, cuma sebatas menanyakan rekayasa lalu lintas terkini, titik-titik parkir strategis, dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Menurutnya, banyak wisatawan yang belum *update*, terkait relokasi PKL ke Teras Malioboro.

"Banyak pertanyaan itu, kok Malioboro sekarang ngga ada pedagangnya lagi terus kita kasih penjelasan, PKL tetap ada, hanya dipindahkan ke pusat-pusat tertentu, ini untuk memudahkan pengunjung juga kan," ujar Wahyu.

Secara garis besar, Kadispar memaparkan, operasional deretari destinasi wisata di wilayahnya, tidak ada masalah sepanjang libur lebaran silam. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang digulirkan jajarannya, hampir seluruh destinasi wisata patuh pada aturan yang berlaku.

"Termasuk soalantisipasi sebaran Covid-19, objek wisata yang kami sidak sudah membentuk tim satgas internalnya. Mereka bertugas, misalnya, ada kerumunan mendadak, itu harus segera diuraikan, dibubarkan," terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kanal aduan melalui nomor 081138701777, baik via aplikasi Whatsapp, atau voice call, masih dipertahankan meski libur lebaran sudah rampung. Menurutnya, Pemkot Yogyakarta terbuka dan menerima keluhan dari wisatawan, selama 24 jam penuh.

"Maksimal 1x24 jam laporan kita respons. Kemudian, dari OPD terkait, yang mempunyai kewenangan, sesuai mandat Pak Wawali, diberi waktu 2x24 jam untuk melaksanakan penindakan terhadap aduan," ungkapnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005